

Transparansi Pasar Saham RI Meroket: 5 Bukti Nyata

Aa Ruslan Sutisna - SUKABUMI.WARTAWAN.ORG

Apr 14, 2026 - 01:14



Transparansi Pasar Saham RI Meroket: 5 Bukti Nyata

Saya merasa optimis melihat langkah-langkah progresif yang diambil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat transparansi pasar saham Indonesia. Sebagai seorang yang peduli dengan iklim investasi, perubahan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan terpercaya bagi semua pihak.

Jakarta, 13 April 2026 – Pasar saham Indonesia kini tengah mengalami transformasi signifikan menuju tingkat transparansi yang lebih tinggi, sejalan dengan standar global. Inisiatif ini, yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertujuan untuk membangun kepercayaan pelaku pasar dan menyelaraskan ekosistem finansial domestik dengan praktik terbaik internasional.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa berbagai kebijakan baru telah dirancang untuk menjawab kekhawatiran para pemangku kepentingan, termasuk para penyedia indeks global. “Kami telah mencapai kemajuan signifikan dalam menjawab berbagai kekhawatiran dari para pemangku kepentingan, serta semakin meningkatkan transparansi dan menyelaraskan pasar domestik dengan standar institusi global,” ujar Friderica di Jakarta, Senin (13/4).

Lima bukti konkret berikut ini menggarisbawahi peningkatan transparansi pasar saham Indonesia:

1. Identitas Pemegang Saham Besar Kini Terbuka

Melalui kolaborasi erat dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), data mengenai pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% kini dapat diakses publik. Informasi penting ini mulai dipublikasikan setiap bulan melalui situs Bursa Efek Indonesia (IDX) sejak 3 Maret 2026. Langkah ini memberikan visibilitas yang jauh lebih jelas kepada investor mengenai pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan dalam sebuah emiten. Jujur saja, bagi saya ini adalah angin segar yang luar biasa, karena kita bisa lebih waspada dan terinformasi.

2. Klasifikasi Investor Lebih Detail

Sebelumnya, investor hanya dikelompokkan dalam 9 kategori. Kini, klasifikasi tersebut diperluas menjadi 39 jenis. Penyusunan klasifikasi baru ini melibatkan berbagai pelaku pasar, termasuk anggota bursa dan bank kustodian, serta telah berlaku efektif sejak 1 April 2026. Dengan data yang lebih rinci, pelaku pasar dapat memahami struktur kepemilikan investor dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang dinamika pasar.

3. Free Float Naik Dua Kali Lipat

OJK bersama IDX telah sepakat untuk meningkatkan batas minimum *free float* dari 7,5% menjadi 15%. Aturan ini mulai efektif berlaku sejak 31 Maret 2026. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong peningkatan likuiditas sekaligus mengurangi potensi dominasi kepemilikan oleh segelintir pihak. Saya pribadi melihat ini sebagai upaya untuk mendemokratisasi kepemilikan saham, agar lebih banyak investor yang bisa berpartisipasi secara aktif.

4. Mengumumkan High Shareholding Concentration (HSC)

IDX dan KSEI kini secara rutin mengumumkan informasi mengenai *High Shareholding Concentration* (HSC). Kebijakan yang mulai berlaku sejak 2 April 2026 ini berfungsi sebagai sinyal peringatan dini bagi investor terkait potensi risiko yang mungkin muncul. Ini adalah langkah proaktif yang sangat saya apresiasi, karena mencegah kita terjerumus ke dalam situasi yang tidak

diinginkan.

5. Kewajiban Laporan Ultimate Beneficial Owner (UBO)

Pemegang saham dengan kepemilikan minimal 10% kini diwajibkan untuk melaporkan *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) kepada IDX. Aturan ini mulai diterapkan pada 1 April 2026. Kebijakan ini dinilai krusial untuk mengungkap pihak yang sebenarnya mengendalikan suatu perusahaan, memberikan lapisan transparansi tambahan yang sangat dibutuhkan.

Langkah-langkah strategis ini merupakan bagian integral dari agenda besar reformasi pasar modal yang sedang diupayakan OJK. Dalam kerangka kerja ini, delapan rencana aksi telah ditetapkan sebagai fondasi penguatan integritas pasar. Peningkatan batas *free float*, misalnya, menjadi fokus utama untuk memastikan perdagangan saham yang lebih sehat dan kompetitif di kancah global. “Untuk memastikan transisi yang lancar, perusahaan tercatat diberikan waktu penyesuaian agar struktur kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan baru,” tambah Friderica. Sementara itu, aspek transparansi diperkuat melalui keterbukaan data kepemilikan saham dan pengungkapan UBO yang lebih komprehensif. Di bidang tata kelola dan penegakan, OJK terus mendorong demutualisasi bursa, memperketat penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan melalui edukasi dan sertifikasi profesional. Dari sisi sinergi, reformasi dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, *self-regulatory organization* (SRO), dan pelaku industri. “Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pendalaman pasar sekaligus memperkuat kepercayaan investor,” tambahnya. Dengan berbagai inisiatif ini, OJK menunjukkan optimisme yang kuat bahwa pasar modal Indonesia tidak hanya akan semakin transparan, tetapi juga menjadi lebih kredibel dan kompetitif di panggung global.